

PULAU KE PULAU

Potong BST, Aparat Desa Bersalah

PEMOTONGAN dana bantuan sosial tunai (BST) melanggar aturan. Aparat desa yang memotong dana itu harus mengembalikannya kepada warga yang berhak.

"Kami melarang segala bentuk pemotongan, dengan alasan apa pun. Termasuk kasus di Desa Baranangsiang, Kecamatan Cipongkor," kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, Heri Partomo, kemarin.

Sebelumnya, seorang penerima bantuan, Dede, 44, warga miskin, mengaku BST yang harus ia terima telah dipotong sebesar Rp1,2 juta. Dia hanya kebagian Rp600 ribu untuk tiga tahap penggulangan dana.

"Aturan Kementerian Sosial sudah jelas. Bantuan harus sesuai calon penerima calon lokasi. Kami akan berkoordinasi dengan kementerian terkait soal ini," lanjut Heri.

Di Jatinangos, Kabupaten Sumedang, jumlah bansos tahap kedua dari Pemprov Jawa Barat untuk warga Desa Hegarmanah, berkurang dari 1.113 menjadi 737 kepala keluarga. "Kami tidak mendapat penjelasan soal itu," kata Irwansyah, kepala dusun. (DG/TJ/N-3)

Rusuh di Pemakaman, 5 Warga Ditangkap

SELASA (21/7) malam, sejumlah warga di Palangka Raya, Kalimantan Tengah, memukul petugas yang hendak memakamkan korban pandemi dengan protokol kesehatan covid-19. Polresta Palangka Raya tidak membiarkan kasus itu berlalu.

Kemarin, penyidik meringkus lima pelakunya. "Mereka sudah ditetapkan sebagai tersangka," kata Kapolresta Komisaris Besar Dwi Tungga Jaladri.

Kepala Satuan Reserse Kriminal Komisaris Todoan Agung Gultom menambahkan dalam pemeriksaan para tersangka mengaku pemukulan dilatarbelakangi kekesalan mereka atas tata cara pemakaman itu. Apalagi, keluarga dilarang ikut merawat korban.

"Kelima pelaku akan dijerat dengan pasal tentang penganiayaan, dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Semoga kasus seperti ini tidak terjadi lagi," harap Gultom. (SS/N-3)

Sosialisasi Tol Gedebage-Cilacap Digeber

TOL Gedebage-Cilacap merupakan harapan warga Jawa Barat, terutama di jalur selatan. Untuk mewujudkannya, pemerintah sudah memulainya, tahun ini.

"Tahapan saat ini ialah sosialisasi dan penentuan lokasi. Pekerjaan fisik ditargetkan dimulai pada 2022 dan tuntas hingga 2024," kata petugas pengadaan tanah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Ade Sudrajat, di Tasikmalaya, Jawa Barat, kemarin.

la menambahkan, Tol Gedebage-Cilacap akan menggunakan 13 ribu bidang tanah di tujuh kabupaten, yakni Bandung, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Pangandaran di Jawa Barat, serta Cilacap, Jawa Tengah. Panjang jalan tol mencapai 206,6 kilometer.

Total anggaran yang disiapkan proyek ini mencapai Rp57 triliun. "Kami terus melakukan pertemuan dengan pemerintah daerah. Khusus di Kota Tasikmalaya, sudah tidak ada kendala, karena wali kota dan jajarannya sudah menyiapkan data terkait," tambah Ade. (AD/N-3)



ANTARA/RONY MUHARRAMAN

SIMULASI PENGAMANAN PILKADA: Petugas Sat Sabhara Polda Riau menggunakan anjing K-9 membubarkan pengunjuk rasa yang anarkistis dalam simulasi Sisparam Kota dalam rangka pengamanan Pilkada Serentak 2020 di Lapangan Sekolah Polisi Negara (SPN) Polda Riau di Kabupaten Kampar, Riau, kemarin. Simulasi digelar guna memastikan kesiapsiagaan para petugas dalam pengamanan Pilkada Serentak 9 Desember 2020 mendatang.

TAPANULI SELATAN

Penambang Bantu Tes Cepat Warga

UPAYA penanganan pandemi di Sumatra Utara mendapat dukungan dunia usaha. Salah satunya PT Agincourt Resources, pengelola Tambang Emas Martabe.

Perusahaan ini bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten Tapanuli Selatan menggelar tes cepat untuk warga di Kecamatan Batangtoru. Mereka menyediakan 2.500 alat tes cepat.

"Kami ingin membantu tugas Pemkab Tapanuli Selatan. Kita bersama melawan covid-19," papar Senior Manager Community PT Agincourt, Prmana Triwahjudi, kemarin.

Kepala Dinas Kesehatan Sri Khairunnisa menyatakan tes cepat digelar di Puskesmas Batangtoru, Pasar Batangtoru, dan Desa Sumuran. "Targetnya warga yang sering berkegiatan di sekitarnya."

Pemkab Musi Banyuasin, Sumatra Selatan, juga terus bergiat melakukan tes cepat. Salah satu sasarannya ialah pegawai Pemkab.

"Kami harus memastikan para pegawai bisa menjalankan pelayanan kepada masyarakat dalam kondisi sehat,"

kata Sekretaris Inspektorat Kabupaten Yulius Adi.

Meski tidak ada wilayah yang berada di zona merah, Pemerintah Kota Yogyakarta terus menggelar antisipasi. Sampai kemarin, sudah 2.377 warga dites usap dan 2.700 orang dites cepat.

"Itu masih sekitar 1,8% dari total penduduk. Kami mengejar target ketentuan WHO sebesar 5%," kata Wakil Wali Kota Heroe Poerwadi.

Angka penjangkitan di kota ini relatif kecil. Warga terkonfirmasi positif sebanyak 43

orang, 38 di antaranya sudah sembuh.

Tes usap menjadi pilihan Pemkab Banyumas, Jawa Tengah. Kemarin, tes dilakukan terhadap pegawai di Mal Pelayanan Publik, setelah sebelumnya enam pegawai di kantor ini positif terjangkit.

"Hari ini, seluruh pegawai yang ber Kantor di MPP harus menjalani tes usap. Kantor ditutup dan pelayanan kepada masyarakat dilakukan secara daring," tandas Kepala Dinas Penanaman Modal, Amrin Ma'rif.

BUPATI Achmad Husein berjanji akan terus mengencangkan tes usap. "Meski risikonya angka positif bisa saja mengalami lonjakan. Ini upaya untuk memutus rantai penyebaran."

Sementara itu, Pemkab Temanggung mengaku sudah melakukan tes cepat untuk 9.237 warga secara gratis. "Yang reaktif mencapai 1.481 orang. Kami sudah menindaklanjuti dengan tes usap terhadap 2.185 warga, dan hasilnya masih ditunggu," kata juru bicara Gugus Tugas Covid-19, Gotri Wijiyanto. (YP/DW/AT/LD/TS/N-3)

KALIMANTAN SELATAN

Gambut Kering Kebakaran di Depan Mata

ANCAMAN kebakaran hutan semakin mendekat. Di Kalimantan Selatan, ancaman itu ditandai dengan mengeringnya kawasan gambut.

"Sudah terjadi penurunan tinggi muka air kawasan hidrologi gambut. Dari sembilan alat pemantau yang terpasang, di Sungai Balangan-Batangalai, tercatat bahwa muka air sudah berada 0,4 meter di bawah permukaan gambut," kata Kepala Dinas Lingkungan Hidup Hanifah Dwi Nirwana, kemarin.

Penurunan tinggi muka air juga terjadi di kawasan hidrologi gambut Sungai Barito-Sungai Tapin. Upaya yang sudah dilakukan ialah dengan melakukan pembasahan ekosistem gambut.

"Tahun ini, kita melaksanakan upaya pembasahan cepat awal Juli," tambah Hanifah.

Di Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah, Kelurahan Marang menjadi salah satu wilayah kerawanan tinggi kebakaran hutan dan lahan. Lurah Marang, Dony Wandira, mengaku tahun ini dia berupaya mengurangnya dengan membangun dua posko pemantauan.

"Sekitar 60% wilayah Marang adalah tanah gambut yang rentan terbakar. Tahun lalu, kami masuk zona merah kebakaran hutan dan lahan," jelasnya.

Dua posko yang sudah dibangun berada di Km 21 Jalan Trans-Kalimantan dan di jalan masuk Kelurahan Marang.

Warga direkrut sebagai relawan untuk ikut memantau.

Perubahan strategi dilakukan Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Sri Mulyono Herlambang, Palembang, Kolonel Pnb Firman Wirayudha. "Jika tahun-tahun sebelumnya, penanganan kebakaran di Sumatra Selatan dilakukan secara kuratif, tahun ini kami ubah menjadi pencegahan dan mitigasi."

Jika sebelumnya helikopter *water bombing* digerakkan setelah mendapat laporan adanya api, tahun ini helikopter sudah bergerak sejak awal. Patroli udara digiatkan, terutama di lokasi rentan kebakaran. Kemunculan asap akan langsung ditangani dengan *water bombing*. (DY/SS/DW/RF/N-2)

BANDUNG

Komunikasi Cerdas Tangkal Radikalisme

KAPAN radikalisme dan intoleransi menjadi-jadi? Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme Boy Raffi Amar menyatakan waktunya bertepatan dengan perkembangan pesat media sosial.

"Penyebarannya semakin menjadi seiring dengan terus berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. Terutama setelah pengguna media sosial terus meluas di masyarakat," tandasnya, dalam Diskusi Daring: Merajut Harmoni, Menepis Radikalisme, yang digelar Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran, Bandung, kemarin.

Untuk itu, berbagai upaya harus dilakukan untuk mengimbangi gempuran arus negatif, demi menjaga keutuhan bangsa. "Indonesia saat ini rentan dengan pengaruh narasi-narasi yang memecah persatuan dan kesatuan bangsa. Kita rentan dari pengaruh konten-konten

komunikasi positif ampuh cegah perpecahan di masyarakat.

radikal."

Menurut Boy, tidak mudah untuk membendung arus informasi yang masuk. Pengaruh negatif ini semakin mudah diterima masyarakat awam karena menggunakan doktrin-doktrin agama yang sesungguhnya tidaklah benar.

Sementara itu, staf pengajar Fikom Unpad, Edwin Rizal menyatakan komunikasi yang positif ampuh untuk mencegah perpecahan di masyarakat. "Melalui komunikasi, bisa memperkuat persatuan, perdamaian, dan toleransi."

Untuk itu, pakar komunikasi harus dilibatkan, sehingga



SILLO MARITIME
PT SILLOMARITIME PERDANA TBK.
berkedudukan di Jakarta
("Perseroan")

PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

Perseroan dengan ini mengumumkan bahwa telah diselenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPS LB"), pada:

A. RUPST

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : 10.18 WIB – 10.53 WIB
Tempat : GHJ Suite Lantai 3, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160

I. AGENDA RUPST

1. Penyampaian Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, rencana kerja Perseroan untuk tahun buku 2020 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
3. Penunjukan Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan meninjau akuntan pengganti serta persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Rapat Dewan Komisaris atas nama RUPS untuk menetapkan besarnya gaji dan/atau honorarium berikut tunjangan lainnya bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.

II. ANGGOTA DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPST:

Direksi:
Direktur Utama : Ibu Herjati
Direktur : Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya
Direktur : Bapak Hans Raymond Ekajaya

III. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPST:

Bahwa untuk agenda rapat ke-1 sampai dengan ke-4 diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.

IV. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPST:

Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah 2.223.024.300 saham atau mewakili 81,7351450% dari 2.719.790.000 saham.

V. KEPUTUSAN RAPAT UNTUK AGENDA RAPAT KE 1 S/D KE 4 :

- a. Jumlah suara yang tidak setuju sebanyak 100 (seratus) saham atau mewakili 0,01% dari 2.223.024.300 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.
- b. Jumlah suara yang setuju sebanyak 2.223.024.200 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu dua ratus) saham atau mewakili 99,99% dari 2.223.024.300 (dua miliar dua ratus dua puluh tiga juta dua puluh empat ribu tiga ratus) saham yang hadir dan/atau diwakili dalam Rapat.

VI. HASIL KEPUTUSAN RUPST:

1. Memberikan persetujuan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019 termasuk persetujuan dan pengesahan Laporan Keuangan, Laporan Direksi serta Laporan Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2020 serta selanjutnya memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
2. Menetapkan penggunaan laba bersih tahun 2019, sebagai berikut:
 - Dividen Tunai sebesar USD2.937.733 atau ekuivalen sebesar Rp43.516.640.000,-
 - Dana Cadangan sebesar USD100.000 atau ekuivalen sebesar Rp1.481.300.000,-
 - sisanya sebesar USD10.912.684 atau ekuivalen sebesar Rp161.649.587.021,- dicatat sebagai laba ditahan untuk kegiatan operasional Perseroan;
 - serta memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
3. Menetapkan untuk menunjuk KAP Kosasih, Nurdiyaman, Mulyadi, Tjahjo & Rekan sebagai Akuntan Publik yang akan memeriksa Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2020 dan mengusulkan untuk memberikan wewenang kepada Direksi untuk menetapkan honorarium dengan jumlah tidak melebihi Rp650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta Rupiah) serta menunjuk akuntan pengganti dan persyaratan lain dari penunjukan tersebut.
4. Menyetujui :
 - a. memberikan gaji atau honorarium untuk Dewan Komisaris Perseroan seltinggi-tingginya USD220.000 (dua ratus dua puluh ribu US Dollar) atau ekuivalen dengan Rp2.388.860,00 (dua milyar dua ratus lima puluh delapan ratus enam puluh ribu Rupiah) untuk periode bulan Juli 2020 sampai dengan penutupan RUPS Tahunan berikutnya pada tahun 2021; serta
 - b. memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, untuk menentukan besarnya dan menetapkan honorarium dan wewenang kepada Direksi untuk mengatur tata cara pembayaran Dividen Tunai sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

B. RUPS LB

Hari/tanggal : Rabu, 22 Juli 2020
Waktu : 10.58 WIB – 11.14 WIB
Tempat : GHJ Suite Lantai 3, Jalan Tanah Abang III Nomor 18, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat 10160

I. AGENDA RUPS LB

1. Persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan.
2. Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia Tahun 2017 dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020.
3. Persetujuan atas peninjauan seluruh atau sebagian besar aset Perseroan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain.

II. ANGGOTA DIREKSI YANG HADIR DALAM RUPS LB:

Direksi:
Direktur Utama : Ibu Herjati
Direktur : Bapak Bartolomeus Christopher Ekajaya
Direktur : Bapak Hans Raymond Ekajaya

Jakarta, 24 Juli 2020
Direksi Perseroan

- III. KUORUM KEHADIRAN DAN KEPUTUSAN UNTUK RUPS LB:**
- Bahwa untuk:
- agenda pertama rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
 - agenda kedua rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
 - agenda ketiga rapat diperlukan kuorum kehadiran lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, sedangkan kuorum keputusannya adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 (tiga per empat) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam rapat.
- IV. JUMLAH KEHADIRAN DALAM RUPS LB:**
- Saham yang hadir dan/atau diwakili dalam rapat berjumlah 2.223.024.300 saham atau mewakili 81,7351450% dari 2.719.790.000 saham.
- V. KEPUTUSAN RAPAT TERSEBUT DISETUJUI OLEH SELURUH PEMEGANG SAHAM/ KUASANYA YANG HADIR SECARA MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT (TIDAK ADA SUARA TIDAK SETUJU MAUPUN SUARA BLANKO/ABSTAIN).**
- VI. HASIL KEPUTUSAN RUPS LB:**
1. Memberikan persetujuan atas pengangkatan kembali anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, sehingga susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut:
 - Direksi:
Direktur Utama (Independen) : HERJATI
Direktur : BARTOLOMEUS CHRISTOPHER EKAJAYA
Direktur : HANS RAYMOND EKAJAYA
 - Dewan Komisaris:
Komisaris Utama : SUTANTO
Komisaris Independen : DJUNGU SITORUS
 2. Memberikan persetujuan atas perubahan ketentuan Anggaran Dasar secara spesifik terkait Maksud dan Tujuan serta Kegiatan Usaha untuk disesuaikan dengan KBLI Tahun 2017, dan ketentuan Anggaran Dasar terkait Rapat Umum Pemegang Saham untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 15/POJK.04/2020.
 3. Memberikan Persetujuan kepada Direksi Perseroan atas rencana Perseroan untuk menjamin seluruh atau sebagian besar aset Perseroan dengan nilai di atas 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan dalam satu tahun buku, baik dalam satu transaksi yang berdiri sendiri ataupun berkaitan satu sama lain, dengan tidak mengesampingkan tata cara dan ketentuan-ketentuan dalam peraturan-peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI

Selanjutnya sesuai dengan keputusan Agenda Kedua RUPST sebagaimana tersebut di atas dimana RUPS LB pada tanggal 22 Juli 2020 telah memutuskan bahwa Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan pada saat Rekening Efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 04 Agustus 2020.

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai

No	Keterangan	Tanggal
1.	Akhir Periode Perdagangan Saham Dengan Hak Dividen (Cum Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	30 Juli 2020 04 Agustus 2020
2.	Awal Periode Perdagangan Saham Tanpa Hak Dividen (Ex Dividen) - Pasar Reguler dan Negosiasi - Pasar Tunai	03 Agustus 2020 05 Agustus 2020
3.	Tanggal Daftar Pemegang Saham yang Berhak Dividen (Recording Date)	04 Agustus 2020
4.	Tanggal Pembayaran Dividen Tunai	19 Agustus 2020

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai

1. Dividen Tunai akan dibagikan kepada pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") atau *recording date* pada tanggal 04 Agustus 2020 (*recording date*) dan/atau Pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI") pada penutupan perdagangan Bursa Efek Indonesia tanggal 04 Agustus 2020.
2. Bagi Pemegang Saham Perseroan yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI, pembayaran dividen tunai dilaksanakan melalui KSEI dan akan didistribusikan pada tanggal 19 Agustus 2020 ke dalam Rekening Dana Nasabah (RDN) pada Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka Sub Rekening Efek. Sedangkan bagi pemegang saham Perseroan yang sahamnya tidak dimasukkan dalam penitipan kolektif KSEI maka pembayaran dividen tunai akan ditransfer ke rekening pemegang saham Perseroan.
3. Dividen Tunai tersebut akan dikenakan pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Jumlah pajak yang akan dikenakan akan menjadi tanggungan pemegang saham Perseroan yang bersangkutan serta dipotong dari jumlah dividen tunai yang menjadi hak pemegang saham Perseroan yang bersangkutan.
4. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak ("NPWP") diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Daindo Entricom ("BAE") dengan alamat Jl. Hayam Wuruk No. 28, Lantai 2, Jakarta 10120 paling lambat tanggal 04 Agustus 2020 pada pukul 16.00 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Luar Negeri tersebut akan dikenakan tarif PPh lebih tinggi 100% dari tarif normal.
5. Bagi Pemegang Saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang pemotongannya pajaknya akan menggunakan tarif berdasarkan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda ("P3B") wajib memenuhi persyaratan Laporan Direktur Jenderal Pajak No. PER-25/PJ/2018 tentang Tata Cara Penerapan Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda serta menyampaikan dokumen bukti rekam atau tanda terima DGT/SKD yang telah diunggah ke laman Direktorat Jenderal Pajak kepada KSEI atau BAE sesuai peraturan dan ketentuan KSEI, tanpa adanya dokumen dimaksud, dividen tunai yang dibayarkan akan dikenakan PPh Pasal 26 sebesar 20%.
6. Bagi Pemegang Saham yang sahamnya dalam penitipan kolektif KSEI, bukti pemotongan pajak dividen dapat diambil di Perusahaan Efek dan/atau Bank Kustodian dimana Pemegang Saham membuka rekening efeknya dan bagi Pemegang Saham Warkat diambil di BAE.